

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ambruknya struktur kekuasaan Orde Baru pada pertengahan 1998, telah membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk merekonstruksi kembali struktur kekuasaan baru yang demokratis, suatu format politik yang disusun atas dasar prinsip bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip tersebut mempunyai makna bahwa setiap pejabat publik yang duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan harus menyadari bahwa kekuasaan itu bersumber dari rakyat. Rakyat yang telah memberikan kepercayaan dengan menyerahkan mandat sebagian kedaulatannya, berhak melakukan kontrol dan menuntut pertanggung jawaban atas kekuasaan dalam jangka waktu tertentu, dan kekuasaan itu dijadikan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berakhirnya era Orde Baru ditandai antara lain dengan munculnya semangat membangun sistem multi partai, sebagai pengganti dari sistem kepartaian Orde Baru yang bersifat semu dan ornamental (Partai Politik hanya hiasan untuk lebih menambah keindahan). Sistem partai yang dikembangkan Orde Baru menempatkan setiap Partai Politik di bawah bayang-bayang kekuasaan Soeharto, sehingga dalam kenyataannya tidak ada Partai Politik yang benar-benar mandiri selama Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Kelahiran Orde Baru juga disertai dengan metode depolitisasi massa. Masyarakat diposisikan sebagai massa mengambang yang hanya diizinkan berpolitik pada saat pemilu (*floating mass*). Dan pada tahun 1973 tunduknya

Partai Politik terhadap kekuasaan negara makin kental saat jumlah Partai Politik disederhanakan menjadi tiga, PPP, PDI dan Golkar. Inilah kebijaksanaan yang dalam sejarah kepartaian disebut fungsi Partai Politik.

Golkar yang pada periode Suharto cenderung sungkan untuk disebut partai menjalani periode pertama kehidupannya sebagai embrio politik antara tahun 1957-1964, yang dilanjutkan dengan berdirinya Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964, dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya yang disingkat Sekber Golkar. Dalam periode ini, Golkar Embrionik yang terdiri dari berbagai kelompok fungsional karya-kekaryaan yang mempolitisasi diri, adalah instrumen untuk membangun basis politik pemberdayaan kekuatan militer *vis a vis* kekuatan politik lain, khususnya PKI saat itu.

Golkar lalu menjalani periode kedua perjalanan politiknya antara 1964-1971. Dalam periode yang singkat ini, Golkar menjadi instrumen bagi militer untuk mengelola proses transisi atau transfer kekuasaan dari demokrasi terpimpinnya Soekarno ke tangan mereka. Pada ujung akhir periode ini Golkar menunaikan tugas instrumentalnya dengan memperoleh suara mayoritas mutlak (62,8 %) pada pemilu 1971 yaitu pemilu pertama Orde Baru.

Periode ketiga Golkar dijalani antara 1971-1978. Inilah periode menentukan bagi Golkar ketika mereka digambarkan oleh Julian M Boileau, di bebani tiga pekerjaan politik besar yaitu, *pertama*, menjadi mesin politik penghasil legitimasi bagi kekuasaan Orde Baru. *Kedua*, memassalkan ideologi pembangunan dalam rangka modernisasi. *Ketiga*, menanggulamkan sistem

kepartaian¹. Dalam periode ini Golkar menjadi kelompok strategis yang bersama-sama elemen Orde Baru lainnya membangun aliansi besar bagi otoritarianisme rezim Soeharto.

Munas II Golkar di Denpasar Bali pada Oktober 1978, membuka langkah Golkar memasuki periode keempat kehidupannya yang cukup panjang yaitu dua dekade 1978-1998. Pada periode ini kekuasaan Orde Baru telah mulai di personalisasi oleh Soeharto, sementara anasir-anasir Orde baru lainnya (militer, birokrasi, teknokrasi, dan kekuatan modal) diposisikan menjadi instrumen kekuasaan personal Soeharto. Dengan memposisikan Golkar secara instrumental, Soeharto mengumpulkan kapabilitas sebagai penguasa tunggal yang memegang tali kendali politik secara efektif.

Jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, mengakhiri periode keempat perjalanan politik Golkar. Golkar dipaksa oleh sejarah untuk memasuki suasana yang sama sekali baru dalam periodenya yang kelima. Dalam periode kelima, Golkar sebagai Partai Politik, diwarisi oleh lima penyakit. *Pertama*, ketergantungan pada militer sebagai ayah kandungnya. *Kedua*, ketergantungan pada birokrasi. *Ketiga*, keterikatan emosional pada sakralisasi ideologi pembangunan dalam kerangka modernisasi. *Keempat*, gerontokrasi yaitu sebuah pemerintahan yang dipegang oleh kaum tua. *Kelima*, terlanjur termanjakan oleh basis massa alienatif, yaitu kemenangan demi kemenangan Golkar tentang praktik mobilisasi dan manipulasi politik².

¹ Dan Saifulloh Fatah "Golkar Betah" ISAI Jakarta 1999 hal 9

Selama Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, Golkar tidak pernah tumbuh sepenuhnya dan mengakar ke dalam masyarakat politik sebagaimana seharusnya sebuah Partai Politik. Di bawah pembinaan Soeharto, Golkar gagal membenamkan dirinya ke dalam tubuh masyarakat Indonesia yang setiap saat bersedia memberikan kepercayaan kepada Partai Politik apapun. Kegagalan ini terjadi akibat sentralisasi kekuasaan pada diri Soeharto, yang selalu menolak setiap bentuk pelembagaan organisasi sosial maupun politik yang bertentangan dengan misi ABRI dan Soeharto, yakni mempertahankan ABRI sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik terbesar, terkuat dan tak terkalahkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa politik yang dimainkan Golkar adalah *political game* Soeharto. Sebagai ketua dewan Pembina Golkar, wewenang dan kekuasaan Soeharto luar biasa besarnya. Ini terlihat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar mengenai mengenai susunan dan tata kerja Dewan Pembina yang dibuat pada tahun 1983, di mana Dewan Pembina memiliki kewenangan untuk membatalkan semua keputusan DPP. Lebih jauh lagi Dewan Pembina juga bisa membekukan DPP bila dinilai melenceng dari keputusan musyawarah nasional (Munas). Dewan Pembina juga bisa menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan menyusun komposisi DPP Golkar. Kekuasaan Dewan Pembina tertuang dalam kekuatan pasal 4 keputusan ketua dewan Pembina No I/DPP-Golkar/1988 tentang susunan dan tata kerja dewan

Penguasaan senjata, informasi, manajemen, dan visi status Quo membuat ABRI lebih diutamakan untuk berkembang pesat. Sementara Golkar disterilkan dari setiap kemungkinan berkembang kearah berlawanan. Semua kekuatan politik termasuk Golkar ditetapkan pada posisi ornamental (hiasan). Perbedaan Golkar dari PPP dan PDI dari sebuah ornamen rezim Soeharto, yang memiliki lebih banyak warna, materi, dan pengaruh tanpa sebuah motivasi yang jelas kecuali melayani kebutuhan rezim Soeharto.

Dalam konteks inilah proses artikulasi dan agregasi inputs (Kepentingan dan tuntutan) serta proses outputs (keluar) dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah seluruhnya diarahkan demi pemeliharaan rezim Soeharto. Kepentingan dan tuntutan masyarakat yang diartikulasikan Golkar ke dalam sistem politik dibatasi pada definisi kepentingan dan tuntutan yang sejalan dengan kepentingan dan tuntutan rezim Orde Baru.

Sepanjang Orde Baru, Golkar tidak pernah sungguh-sungguh berusaha untuk meningkatkan profesionalitas sebagai sebuah partai yang mewakili kepentingan dan tuntutan masyarakat luas yang sangat dinamis. Golkar terus menerus mengandalkan ABRI sebagai tulang punggung dirinya dalam setiap persaingan politik baik pada massa pemilu maupun di luar massa pemilu. Golkar pada dasarnya hanya menjawab persoalan-persoalan yang muncul dari rezim Soeharto tapi menolak dengan tegas segenap persoalan yang dirasakan sebagai persoalan masyarakat umum⁴.

Mobilisasi massa, baik pada saat pemilu maupun di luar pemilu yang dilancarkan Golkar, sangat tergantung pada fasilitas yang dimiliki pemerintah dan hanya Golkar yang memiliki akses ke fasilitas pemerintah tersebut. Pemanfaatan fasilitas pemerintah mungkin bisa diterima sebagai mana di praktikan juang oleh negara-negara barat menjelang pemilu. Golkar menggunakan segala yang tersedia dalam lembaga-lembaga pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah dengan tujuan utama untuk tidak dikalahkan oleh partai-partai politik lainnya yaitu PPP dan PDI.

Sejak bergulirnya roda reformasi pada awal tahun 1998 banyak orang telah memprediksikan akan terjadi gelombang badai raksasa yang akan menimpa kekuatan sosial politik terkuat sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru di Indonesia. Apalagi sejak berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari tampuk kepresidenan republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun.

Akhirnya ketidakmandirian Golkar terkelupas dengan cepat sejak Soeharto tidak lagi mampu memainkan peran utamanya sebagai semen pengikat kelompok-kelompok yang sangat heterogen dalam tubuh besar Golkar. Perlahan-lahan organisasi raksasa tersebut mulai limbung dan secara bertahap pula mulai kehilangan sebagian tokoh-tokohnya.

Ketika Soeharto lengser dan sistem multi partai di era reformasi di canangkan oleh pemerintahan Habibie, munculah segudang harapan bahwa iklim politik yang baru saja dibangun kembali akan membantu partai-partai politik menemukan jati diri termasuk didalamnya Golkar sendiri. Walaupun Habibie

secara otomatis telah ditunjuk menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, namun mundurnya Soeharto tetap saja dianggap merupakan pertanda awal datangnya badai besar melanda kekuatan politik terbesar di Indonesia.

Mesin politik Orde Baru ini di anggap semakin terpuruk setelah terjadi arus perpecahan di dalam tubuh Golkar. Indikasi perpecahan yang paling tampak adalah ketika Golkar menghadapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Juli 1998. Saat itu di tubuh elit Golkar menguat persaingan posisi penting di Golkar antara kubu Eddy Sudrajat yang didukung oleh mantan Wapres RI Try Sutrisno di satu pihak dan kubu Akbar Tanjung yang mendapatkan dukungan dari lingkungan Presiden BJ.Habibie. Ujung dari persaingan tersebut adalah terpilihnya Ir.Akbar Tanjung sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

Kendala lain yang muncul dan ikut menggiring keterpurukan Golkar di awal reformasi kala itu, adalah beberapa tokoh baru Golkar yang memiliki akar massa justru ikut meninggalkan Golkar. Yusril Ihza Mahendra, hengkang dari Golkar dan mendirikan Partai Bulan Bintang. Adi Sasono yang di dalam komposisi DPP Golkar hasil Munaslub tahun 1998 dianggap ikut memperkuat Golkar melalui massa dari kalangan cendekiawan Muslim dan LSM, justru membentuk Partai Daulat Rakyat. Sementara birokrasi dibebaskan dari pengaruh Golkar, Jenderal Try Sutrisno membawa purnawiraan ABRI untuk tidak lagi menetapkan Golkar sebagai satu-satunya penyalur aspirasi politik. Dahulu pada era sebelumnya jika terdapat purnawirawan ABRI memilih partai lain menjadi sorotan. Tetapi di era Try Sutrisno, purnawiraan dibebaskan untuk tidak lagi

menjadikan mesin politik Orde Baru itu sebagai satu-satunya pilihan politik dalam pemilihan umum⁵.

Peta posisi Golkar yang tidak prospektif membuat semakin kukuhnya asumsi bahwa Golkar tidak akan bertahan lama dalam perkembangan era reformasi, tetapi secara perlahan-lahan akan ditinggalkan massanya. Golkar bahkan akan mengalami kekalahan amat fatal dalam pemilu 1999 terutama karena penyakit elit Golkar baik di kalangan birokrasi, purnawiraan ABRI dan juga organisasi massa pendukungnya yang telah angkat kaki dari kekuatan politik Golkar.

Pengalaman pemilu Orde Baru selama ini menunjukkan Golkar selalu menang hampir diseluruh Kabupaten. Pada pemilu 1987, Golkar hanya kalah di empat Kabupaten yaitu Pidie, Aceh Besar, Aceh Utara, dan Sampang. Pada pemilu 1992 dan 1997, Golkar kalah di tiga kabupaten dari 308 Kabupaten dan kotamadya di Indonesia. Namun kondisi yang dihadapi Golkar di bawah nakoda baru Akbar Tanjung memang tidak gampang. Kekawatiran bahwa Golkar akan kehilangan banyak pendukung di era multi partai tahun 1999. Golkar juga sulit melepaskan diri dari citra sebagai mesin politik Orde Baru.

Melalui kerja keras Akbar Tanjung dan tim Partai Golkar baru, kekuatan politik ini memang kemudian membuktikan kekuatannya setelah di deklarasikannya Golkar menjadi Partai Golkar pada tanggal 7 Maret 1999 sebagai reinkarnasi sekber Golkar, karena dalam pemilihan umum tahun 1999, Golkar masih berada dalam barisan kekuatan utama Partai Politik lima besar pemenang

⁵ Dari UM Yusuf, "Golkar Abad XXV" Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, Jakarta, 2000.

pemilu, selain PDIP, PAN, PPP, dan PKB. Bahkan Golkar mendapat suara terbanyak kedua dengan mengantongi 120 kursi di DPR RI, terpaut sedikit dari PDIP yang mengantongi 154 kursi. Posisinya jauh lebih baik dari PAN dan PKB yang tadinya di prediksi oleh banyak pihak akan mengalahkan Partai Golkar dalam pemilihan umum tahun 1999.

Dalam pemilu 1999 menurut Ramli HM Yusuf, Partai Golkar kalah secara kuantitas. Merosotnya dukungan suara Partai Golkar amat tajam apabila di bandingkan dengan perolehan suara Golkar pada massa-massa kekuasaan rezim Orde Baru. Namun kemenangan Partai Golkar pada pemilu 1999, tampak lebih indah dan memuaskan karena datang dari sebuah perjuangan berat di tengah hujatan dari berbagai kalangan yang tidak suka terhadap Partai Golkar. Kemenangan itu memberikan bukti baru bahwa bukan hanya dengan menggantungkan keatas Partai Golkar bisa meraih kemenangan, akan tetapi Golkar ternyata merupakan Partai Politik Indonesia yang mempunyai massa riil dalam kehidupan masyarakat Indonesia⁶.

Selanjutnya, pemilu multi partai kedua di era reformasi tahun 2004, telah berlangsung dengan aman dan tertib yang diikuti oleh 24 Partai Politik peserta pemilu, termasuk di dalamnya Partai Golkar. Bambang Cipto berpendapat, dampak positif dari pertumbuhan Partai Politik yang sedemikian luar biasa akan memberikan suasana keterbukaan yang sungguh-sungguh, dalam arti bahwa masyarakat benar-benar menikmati iklim keterbukaan ini dan memanfaatkannya

⁶ *Ibid* hal 7

melakukan konsolidasi internal organisasi sekaligus menyusun strategi menghadapi pemilu 2004 untuk merebut kemenangannya kembali seperti pada era Orde Baru berkuasa. Salah satu strategi Partai Golkar untuk merebut dukungan masyarakat adalah dengan menggelar konvensi calon presiden Partai Golkar. Sebab peserta konvensi yang berasal dari unsur Partai Golkar maupun dari unsur diluar Partai Golkar, berkewajiban untuk ikut berkampanye guna memenangkan Partai Golkar pada pemilu legislatif 2004. Dari 6 (enam) peserta konvensi calon presiden Partai Golkar, tercatat nama Akbar Tanjung dan Yusuf Kalla sebagai calon presiden unsur dari dalam Partai Golkar, sedangkan Wiranto, Surya Paloh, Aburizal Bakri dan Prabowo sebagai peserta konvensi dari luar unsur Partai Golkar. Dan hasilnya dapat terlihat dari kemenangan partai Golkar pada pemilu legislatif 2004.

Dampak dari konvensi calon presiden Partai Golkar, ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perolehan suara Golkar khususnya di daerah-daerah. Sebab dengan konvensi tersebut, Partai Golkar membuktikan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang disebut dengan paradigma baru Partai Golkar sebagai partai modern dalam mereformasi diri, yaitu dengan tidak bergantung pada figur ketua umumnya menjadi satu-satunya alternatif calon Presiden, seperti yang diperlihatkan oleh Partai Politik lainnya, seperti halnya PDIP dengan Megawati, PAN dengan Amin Rais, dan PKB dengan Abdurahan Wahid, walaupun ada penurunan jumlah perolehan kursi Partai Golkar di DPRD beberapa daerah di luar Pulau Jawa, khususnya di Pulau Sulawesi yang selama ini menjadi basis terkuat Partai Golkar pada pemilu 1999

Lebih lanjut, di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, pada pemilu-pemilu sebelumnya yaitu periode awal pemilu Orde Baru dari tahun 1971 sampai dengan periode akhir pemilu Orde Baru tahun 1997, Golkar menduduki peringkat pertama pemenang pemilu dengan suara mayoritas mutlak, memasuki gerbang reformasi pada pemilu multi partai 1999, di tengah hujatan dan cacian dari lawan-lawan politiknya terhadap bekas mesin politik Orde Baru itu, Partai Golkar masih memperlihatkan keunggulan dan kekuatannya sebagai pemenang pemilu dengan memperoleh kursi terbanyak di DPRD Banggai.

Konstelasi politik menjelang pemilu 2004 di Kabupaten Banggai, mengundang banyak analisis oleh beberapa kalangan masyarakat, bahwa pada pemilu legislatif 2004 adalah gerbang awal kehancuran dan kegagalan Partai Golkar untuk meraih kemenangannya kembali. Pendapat itu muncul karena dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa dan dinamika politik lokal yang terjadi sepanjang tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Peristiwa-peristiwa itu antara lain adalah kekalahan calon yang dijagokan Partai Golkar dalam pemilihan bupati pada periode 2001-2006, yang akhirnya dimenangkan oleh calon dari koalisi PDIP dan PPP.

Pertarungan politik pada pemilu multi partai pertama 1999, Partai Golkar menduduki urutan pertama pemenang pemilu dan berhasil merebut 19 (sembilan belas) kursi dari 40 (empat puluh) kursi yang tersedia di DPRD kabupaten Banggai. Sedangkan pada pemilu legislatif 2004, Partai Golkar menduduki urutan pertama pemenang pemilu dengan mengantongi 13 (tiga belas) kursi dari 30 (tiga puluh) jumlah kursi DPRD Banggai yang dibutuhkan oleh 24 Partai Politik yang

terdaftar sebagai pemilu legislatif 2004. Pengurangan jumlah kursi pada pemilu 1999 menjadi 30 kursi pada pemilu 2004, disebabkan oleh telah dihilangkannya fraksi TNI/Polri. Hilangnya fraksi TNI/Polri dan pengurangan jumlah kursi tersebut, terjadi disemua tingkat badan perwakilan rakyat di seluruh Indonesia, Baik itu DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Tabel 1
Persentase Suara Dan Perolehan Kursi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif 2004 Di DPRD Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah

No	No. Urut Partai	Partai Politik Pada Pemilu Legislatif 2004	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Persentase Suara
1.	1	PNI Marhaenisme	3.239	-	2,01 %
2.	3	PBB	10.631	3	6,61 %
3.	4	Partai Merdeka	1.299	-	0,81 %
4.	5	PPP	5.779	1	3,59 %
5.	6	PDK	476	-	0,29 %
6.	7	TIB	380	-	0,24 %
7.	8	PNBK	1.107	-	0,69 %
8.	9	Partai Demokrat	11.656	3	7,24 %
9.	10	PKPI	3.773	-	2,34 %
10.	11	PPDI	1.209	-	0,76 %
11.	12	PPNUI	1.250	-	0,78 %
12.	13	PAN	11.426	3	7,10 %
13.	14	PKPB	5.246	-	3,26 %
14.	15	PKB	9.180	3	5,70 %
15.	16	PKS	3.721	-	2,31 %
16.	17	PBR	3.992	-	2,48 %
17.	18	PDI Perjuangan	18.722	4	11,63 %
18.	19	PDS	3.616	-	2,25 %
19.	20	Partai Golkar	61.610	13	38,29 %
20.	21	Partai Patriot Pancasila	546	-	0,34 %
21.	22	PSI	1.596	-	0,99 %
22.	23	PPD	126	-	0,08 %
23.	24	Partai Pelopor	336	-	0,21 %
		Jumlah	160.916	30	100 %

Dengan perolehan 13 kursi di DPRD Banggai, Partai Golkar pada pemilu legislatif 2004 mengalami penurunan yang sangat tajam, dibandingkan pemilu pada tahun 1999 dimana Partai Golkar memperoleh kursi yang signifikan dengan 19 kursi. Tetapi kemenangan 13 kursi tersebut, adalah suatu bukti yang coba diperlihatkan oleh para elit lokal Partai Golkar di Kabupaten Banggai untuk menafikan berbagai analisis dari banyak kalangan, tentang akan berakhirnya kejayaan Partai Golkar pada pemilu legislatif 2004 di daerah tersebut.

Selain itu Partai Golkar di Kabupaten Banggai, adalah Partai Politik yang mempunyai jaringan sangat luas dan mengakar pada level masyarakat paling bawah (akar rumput). Sebab hal itu salah satunya didukung oleh popularitas figur-figur elit lokal Partai Golkar Kabupaten Banggai yang lebih menonjol di mata masyarakat dibandingkan dengan elit-elit lokal Partai lainnya, karena sebagian besar elit-elit lokal Partai Golkar selain tokoh-tokoh lama, juga aktor-aktor politik lokal yang banyak mewarnai wacana dan dinamika politik lokal, baik itu di media massa lokal maupun pentas percaturan politik lokal di Kabupaten Banggai.

Alasan penekanan pada elit kali ini, pertama elit merupakan seseorang atau kelompok yang mempunyai posisi strategis dan kekuatan politik paling mendasar secara struktural. Kedua, elit secara langsung mempunyai kekuatan kultural dalam masyarakat sehingga menguntungkan dalam konteks ini adalah menguntungkan partai politik. Ketiga, elit dapat dipandang dua dimensi. Dimensi pertama, yaitu elit dapat diartikan sebagai bentuk sosok tokoh masyarakat yang kharismatik, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi, serta mempengaruhi

mengambil judul "PERAN ELIT LOKAL DALAM KEMENANGAN PARTAI GOLKAR".(Studi kasus pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah).

B.Perumusan Masalah.

Seperti apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

"Bagaimana peran elit lokal dalam kemenangan Partai Golkar pada pemilu legislatif 2004 Di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah ?"

C.Tujuan Dan Manfaat Peneletian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1.Mendeskripsikan tentang peran-peran elit lokal dalam kemenangan Partai Golkar Di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah pada pemilu legislatif 2004.
- 2.Mendeskripsikan sejauh mana peran elit lokal dalam kemenangan Partai Golkar.

D.Kerangka Dasar Teori

D.1. Peran

Peran adalah merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa juga disebut status objektif peran dan status adalah kait

mengkait karena merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban sedangkan kedua unsur ini tidak ada artinya jika tidak dipergunakan¹⁰.

Peran menurut Astrid S Susanto sedikitnya mengandung tiga hal¹¹:

- 1). Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2). Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
- 3). Peran dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur lingkungannya.

Dari ketiga hal tersebut yang terpenting adalah interaksi antara seseorang yang menjalankan peran dengan orang yang ada di sekitarnya ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat memberi pelayanan lebih serta memiliki kelebihan ganjaran sosial lebih sedikit akan cenderung menentukan interaksi dengan kata lain, individu memiliki kedudukan dominan atas individu lainnya dimana itu mempunyai kekuasaan. Sementara itu kedudukan yang dominan dapat juga diperoleh dengan sumber yang lain. Selain kekayaan dan kehormatan, ada juga unsur lain yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara periodik

Status yang dimiliki seseorang tidak terlepas dari peranan-peranan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada masyarakat. hal ini terjadi karena sistem

¹⁰ Astrid S Susanto, "Peranan Sosial dan Perubahan Sosial" Pinar Cipta, Jakarta, 1985

sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan seseorang terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status seseorang, demikian sebaliknya status yang tinggi adanya peranan yang sangat tinggi pula.

Menurut Soerjono Soekamto peran adalah merupakan aspek dinamis dari pada kedudukan atau status, jadi apabila seseorang menggunakan hak-hak dan kewajibannya maka ia mengutamakan perannya¹².

Pendapat lain mengenai definisi peran diungkapkan oleh Bloock bahwa peran adalah suatu konsep yang dipakai oleh sosiolog untuk mengetahui pola tingka laku yang teratur dan relative bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingka laku yang sosial dengan tuntutan peran yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Jack C Plano Robert E. Riggs dan Hallena S Robbi, terjemahan Edi S Siregar peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.¹³

Dari pengertian di atas maka peran yang dijalankan sangat ditentukan oleh status ataupun kedudukan yang dijabatnya. Apabila seseorang atau subjek perilaku sesuai atau melaksanakan hak-hak dan kewajibannya karena kedudukan atau status maka ia telah melaksanakan perannya.

¹² Soerjono Soekamto "Sosiologi Suatu Pengantar" CV Rajawali, 1982, Hal 22

D.2 Elit lokal

D.2.1. Pengertian Elit

Untuk lebih memahami elit, maka ada beberapa konsepsi yang menggambarkan definisi tentang elit politik. JW.Schoorl, menggambarkan pengertian elit sebagai :

Dalam arti yang paling umum, elit menunjukkan kelompok orang yang didalam masyarakat menempati kedudukan-kedudukan tinggi. Dalam arti kusus ialah sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil memegang pemerintah serta lingkungan dari mana pemegang kekuasaan itu diambil¹⁴.

Setiap bentuk kelompok dimana pun berada, selalu terdapat kelompok kecil yang berkuasa atas massa rakyat yang besar. Dengan demikian dapat pula di katakan bahwa dalam suatu masyarakat akan ada unsur oligarki dalam kepemimpinan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kemustahilan dari semua untuk memimpin semua¹⁵. Sehingga diperlukan adanya kelompok kecil, dari semua itu mampu yang mampu memimpin, mengatur dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, kelompok kecil dinamakan elit.

Pengertian tentang elit antara lain dikemukakan oleh Vilfredo Pareto yang menyatakan elit sebagai kelompok orang memiliki indeks tertinggi dalam kegiatan mereka¹⁶.

Menurut Gaetano Mosca elit adalah tiap-tiap masyarakat entah suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil selalu membentuk dua

¹⁴JW.Schoorl, Modernisasi "Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang" Jakarta 1988 hal 128

¹⁵ Suzanne Keller "Demokrasi dan Kelompok Elit" Jakarta 1987 hal 9

kelompok utama yaitu kelompok elit (yang memimpin) dan kelompok massa (yang dipimpin)¹⁷.

Kemudian Mosca menguraikan perbedaan diantara elit dan kelompok massa adalah:

Kelompok elit jumlahnya agak sedikit mengambil peran utama hampir semua fungsi politik nasional, memonopoli kekuatan dan menikmati keuntungan dari padanya sedangkan kelompok massa dibina dan diawasi kelompok pertama baik secara legal ataupun tidak dengan tanpa pedoman hukum dan kekerasan.

Dari batasan itu, Mosca menguraikan hubungan dinamis antara elit dan massa. Para elit berusaha bukan hanya menyangkut dirinya sendiri atas anggota masyarakat lain, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya melalui sub elit yang terdiri dari kelompok besar, dari seluruh kelompok menengah kebawah, aparatur pemerintah, manager administrator lainnya, ilmuwan dari kawan intelektual lainnya¹⁸.

Selanjutnya masalah elit, Gaetano Mosca merinci merinci klasifikasi elit¹⁹:

a. Elit yang memerintah yang terlibat langsung atau tidak terlibat langsung dalam pemerintah.

b. Elit yang tidak memerintah yang merupakan sisa yang besar dari seluruh elit.

Dari klasifikasi elit tersebut diatas dapat ditarik sebagai alasan:

Pertama, keadaan struktural dari organisasi yang herarki, dimana selalu terjadi bahwa lapisan bawah akan lebih besar dibandingkan dengan atasnya. Contoh

Kedua, bahwa golongan elit memiliki kemampuan dan sifat-sifat tidak setiap orang memilikinya.

D.2.2. Elit Lokal Di Indonesia

Selain menempati struktur penting dalam konstalasi politik nasional, dalam ranah lokal juga banyak terdapat elit yang disebut elit lokal. Menurut Abdul Kapphi, elit lokal dibagi menjadi tiga kelompok besar, Yaitu:

Kelompok pertama kelompok bangsawan yang memperoleh kedudukan elit karena faktor darah keturunan. Kelompok kedua, adalah kaum ulama (tokoh agama) yang mencapai posisi elit karena pengetahuan agamanya tinggi. Kelompok ketiga, adalah mereka karena jabatan atau kedudukannya, perangkat birokrasi kekuasaan berhasil memperoleh status elit. Elit birokrasi ini yang bukan bangsawan atau ulama, biasanya ditemukan sebagai pengemban tugas-tugas rutin yang dibebankan oleh adat tradisi²⁰.

Dalam era sesudah kemerdekaan, terjadi perubahan yang bermakna dalam komposisi dan peranannya. Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem birokrasi pemerintah, ekonomi, transportasi dan pendidikan.

Semua itu melahirkan struktur sosial baru menggantikan struktur lama yang menciptakan komposisi elit baru ini, peran dan pengaruh golongan bangsawan sudah mulai memudar jika tidak disebut menghilang sama sekali, karena darah keturunan bukan lagi merupakan ukuran dalam meraih posisi elit. Sementara kaum ulama (tokoh agama) masih berhasil mempertahankan diri

sebagai salah satu elit penting di Indonesia, sedangkan kelompok elit birokrasi (pemerintah) bukan saja berhasil bertahan tetapi juga mengalami proses pengembangan, terutama karena tuntutan zaman.

Kedudukan elit sebagai pemimpin masyarakat berkemampuan untuk melakukan usaha penyesuaian antara prakarsa dan bimbingan dengan kemampuan dan keinginan masyarakat. Usaha tersebut adalah para elit diharapkan mampu menterjemahkan gagasan, nilai atau target dari luar (pemerintah) agar dapat di pahami oleh masyarakat kepada pemerintah atau sebaliknya.

D.2.3. Hubungan Elit Dan Massa Di Indonesia

Elit adalah tokoh yang terkemuka dalam suatu masyarakat atau bangsa. Di Indonesia posisi dan peran elit atau tokoh terkemuka masih cukup kuat, mengingat struktur masyarakat Indonesia masih banyak diwarnai oleh budaya patrimonial dan bersifat feodal. Struktur masyarakat yang patrimonial dibangun di atas pola hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin layaknya bapak dan anak atau bawahan dan atasan. Sedangkan struktur masyarakat bawahan lebih banyak dipengaruhi oleh pola hubungan dalam budaya kebangsawanan.

Dalam struktur sosial patrimonial, tokoh atau pemimpin berkedudukan dan berperan sebagai bapak yang melindungi dan mengayomi anak buah, sedangkan rakyat atau masyarakat sebagai anak buah yang harus di ayomi oleh sang bapak. Dalam stuktur sosial feodalisme pola hubungan antara tokoh dan massa malahan lebih kaku karena para tokoh atau pemimpin itu mewarnai kekuasaan darah biru yang mutlak dan hanya saja ditenti oleh selatunya yang berkedudukan dan

Manakala struktur patrimonial dan feodal merambah dan diterapkan dalam sistem kekuasaan negara modern, maka yang terjadi adalah berbagai keanehan dan kejanggalan perilaku politik para aktor. Budaya patrimonial dan feodal dalam kehidupan bangsa sungguh merusak dan tidak sehat bagi demokratisasi dan reformasi di seluruh bidang kehidupan. Kedua budaya itu akan selalu mematikan demokrasi dan reformasi yang tumbuh dari rakyat. Maka mustahil akan lahir sistem masyarakat yang demokratis dan reformatif dengan cita-cita pembentukan *civil society* manakalah budaya feodal dan patrimonial di kembangkan dalam sistem kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Memberantas budaya feodalisme dan patrimonialisme di Indonesia menjadi persoalan yang cukup rumit dikarenakan oleh, *pertama*, bahwa kedua budaya itu secara politik telah tertanam kuat, baik pada era demokrasi terpimpin pada zaman Orde Lama di bawah kekuasaan Soekarno yang otoriter maupun dalam rezim Soeharto yang represif di zaman Orde Baru dengan jargon demokrasi pancasila, dan di era reformasi jaman Abdurrahman Wahid dan Megawati berkuasa. Sehingga budaya feodalisme dan Patrimonialisme telah menjadi sistem dan kebudayaan politik di negeri ini.

Kedua, budaya patrimonial dan feodal telah banyak menciptakan keuntungan politik bagi sebagian besar para tokoh atau elit bangsa dan elit masyarakat di negeri ini, baik ditingkat pusat sampai ditingkat daerah dan tingkat lokal. Pada era Orde Baru melalui tangan kekuasaan birokrasi pemerintah, kebijakan Soeharto yang tertutup dan APDI yang tidak pernah dibuka oleh

Kedua budaya yang anti demokrasi itu telah menjadi semacam rumah indah dan mewah bagi para aktor di Indonesia. Pasca Orde Baru, tokoh politik seperti Gus Dur, dan Megawati yang termasuk mewarisi dan telah mempraktekkan budaya patrimonial dan feodal dari bapaknya Soekarno. Gejala penokohan Megawati secara berlebihan melahirkan *silent majority*, rakyat kebanyakan yang statis, diam, dan gagap yang mudah dimobilisasi secara politik oleh para tokohnya. Sebagian rakyat menjadi tidak dapat bersikap rasional terhadap tokohnya dan hal demikian dipelihara untuk memperkokoh posisi sang elit.

Ketiga, kondisi masyarakat Indonesia selain mewarisi budaya patrimonial dan feodal secara struktural dan budaya, juga masih berada pada tingkat pendidikan dan ekonomi yang rentah atau mentah. Masyarakat menjadi muda terkesima pada para tokohnya, kendati secara kapabilitas para tokoh itu berada di bawah standar sebagai tokoh sesungguhnya baik dari kemampuan ilmu, wawasan, manajerial, maupun komitmen kebangsaannya.

Keempat, masih terdapat paham keagamaan yang masih melestarikan feodalisme atau patrimonialisme dalam budaya dan mitos kewalian. Paham keagamaan yang demikian masih cukup berpengaruh karena selain memiliki wibawa religius atas nama tuhan, pada saat yang sama sebagian besar umat masih rentan secara ekonomi dan politiknya sehingga tidak berdaya oleh hegemoni

D.2.4. Kepemimpinan

Secara sederhana pemimpin bisa didefinisikan sebagai seorang yang terus menerus membuktikan bahwa ia mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain, lebih dari kemampuan mereka (orang lain itu) mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh antara pemimpin dengan dengan pengikut dalam mengajjar tujuan bersama²¹.

Dalam studi kepemimpinan terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan proses kelahiran pemimpin yang secara dominan mempengaruhi perkembangan teori di bidang kepemimpinan. Pendekatan yang pertama berangkat dari asumsi tentang adanya sifat-sifat dan bakat kepribadian tertentu yang dimiliki oleh seseorang, baik sebagai bawaan kelahiran maupun sebagai hasil dari pengalaman sendiri, yang kemudian membentuk kapasitas kepemimpinannya. Pendekatan kedua menekankan pada sesuatu lingkungan, didalam mana berlangsung interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya sebagai pengaruh faktor determinan dari lahirnya seorang pemimpin. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa seorang pemimpin lahir sebagai produk situasi lingkungan yang secara kebetulan mempertemukan dua gejala, yaitu kualitas kepribadian seseorang dan tuntutan situasi yang membutuhkan pemimpin dengan kualitas yang sama²².

Menurut Kenneth F Janda, faktor kontributif lain yang layak dianalisa bersama faktor kepribadian pemimpin adalah, pertama lingkungan sosial dan fisik dimana interaksi kelompok berlangsung. Kedua, tuntutan kebutuhan kolektif yang

21. ...
22. ...

perlu diatasi. Ketiga, karakteristik kepribadian dari orang-orang lain dalam kelompok itu²³.

D.3. Peran Politik Elit Lokal

Transisi politik di Indonesia yang bergulir sejak pasca reformasi memberikan nuansa baru dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia lokal dalam hal ini adalah terbukanya gerbang demokrasi secara luas dan makin meningkatkan peran elit lokal dalam pembangunan didaerah²⁴. Kebijakan politik memang sangat berarti bagi upaya pemberdayaan sumber daya manusia karena melalui keputusan politik ini segala aktivitas kehidupan dapat ditentukan.

struktur sosial baru menggantikan struktur lama yang menciptakan komposisi elit baru ini, peran dan pengaruh golongan bangsawan sudah mulai memudar jika tidak disebut menghilang sama sekali, karena darah keturunan bukan lagi merupakan ukuran dalam meraih posisi elit. Sementara kaum ulama (tokoh agama) masih berhasil mempertahankan diri sebagai salah satu elit penting di Indonesia, sedangkan kelompok elit birokrasi (pemerintah) bukan saja berhasil bertahan tetapi juga mengalami proses pengembangan, terutama karena tuntutan zaman.

Kedudukan elit sebagai pemimpin masyarakat berkemampuan untuk melakukan usaha penyesuaian antara prakarsa dan bimbingan dengan kemampuan dan keinginan masyarakat. Usaha tersebut adalah para elit diharapkan mampu

²³ *Ibid* hal 77

menterjemahkan gagasan, nilai atau target dari luar (pemerintah) agar dapat di pahami oleh masyarakat kepada pemerintah atau sebaliknya.

Sebagai tindak lanjut, untuk peingkatan peran politik elit perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, memperkuat partisipasi peran politik elit lokal dalam dunia politik baik secara langsung dalam partai politik maupun diluar partai politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran politik elit lokal dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental. *Kedua*, secara kualitas keterlibatan politik elit lokal dalam dunia politik harus lebih proaktif atau semacam komunikasi dua arah dengan politik elit pusat, hal ini penting agar elit lokal tidak terisolasi dalam kehidupan politik khususnya di daerahnya.

D.4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sebuah proses politik untuk menjamin kedaulatan rakyat, yang dengannya akan memilih para wakil parlemen. Dan para anggota parlemen terpilih itu, nantinya yang akan menentukan para pelaksana pemerintahan dan sistem politik yang akan dijalankan²⁵.

Pemilihan Umum lebih lanjut disebut pemilu, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2003 adalah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun konsep yang berkaitan erat dengan badan perwakilan rakyat seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti ialah berupa sistem pemilihan umum. Hal ini disebabkan salah satu fungsi sistem pemilihan umum ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan.

Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum. *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum. Sesuai prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Kedua, pemilihan juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Adapun azas pemilihan umum yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil²⁶.

Menurut Miriam Budiardjo, dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu²⁷ :

a. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik).

b. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau Sistem Perwakilan Berimbang).

Lebih lanjut, pengertian dari pada prinsip pokok tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sistem Distrik

Sistem Distrik adalah suatu sistem pemilihan umum di mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakilnya di parlemen, di bagian atas distrik-distrik yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen. Dan tiap distriknya hanya memilih satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut yaitu yang memperoleh suara terbanyak²⁸.

Sistem ini menggunakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya di sebut karna kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan

²⁷ Miriam Budiardjo "Dasar-Dasar Ilmu Politik" PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999 hal 177

²⁸

jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat, ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh satu suara yang terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhentikan lagi, bagaimana pun kecil selisih kekalahannya. Jadi, tidak seperti sistem menghitung suara lebih seperti yang dikenal dalam sistem perwakilan berimbang. Sistem pemilihan ini di pakai di Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan India²⁹.

b.Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional)

Sistem pemilihan proporsional atau perwakilan berimbang adalah suatu sistem dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan kepada partai-partai politik yang ikut dalam pemilihan umum tersebut sesuai dengan perimbangan suara yang di peroleh dalam pemilihan yang bersangkutan³⁰.

Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang didapat oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini ditentukan susutu perimbang, misalnya 1:400.000 yang berarti bahwa sejumlah pemilih tertentu (dalam hal ini 400.000 pemilih) mempunyai satu wakil dalam perwakilan rakyat. Jumlah total anggota perwakilan rakyat di tentukan atas dasar perimbangan (1:400.000) itu. Negara dianggap satu negara

²⁹ Miriam Budiardjo "Dasar-Dasar Ilmu Politik" PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999 hal 177

³⁰ Lihat Buku dan Bersejarah (Pandangan Bersejarah) Politik Untuk Pendidikan, DACT dan DISIST

pemilihan yang besar, akan tetapi untuk keperluan teknis administratif di bagi dalam beberapa daerah pemilihan yang besar (yang lebih besar dari pada distrik dalam sistem distrik).

Dalam sistem ini setiap suara dihitung, dalam arti bahwa suara lebih yang di peroleh suatu partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain. Untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sistem perwakilan berimbang ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain yaitu antara lain dengan sistem daftar. Dalam sistem daftar setiap partai atau golongan mengajukan satu daftar calon dan si pemilih untuk memilih salah satu daftar darinya dan dengan demikian memilih salah satu partai dengan semua calon yang diajukan itu untuk bermacam-macam kursi yang diperebutkan. Sistem perwakilan berimbang dipakai di negeri Belanda, Swedia, Belgia, Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada pemilu 2004, baik pemilu presiden atau pemilu legislatif para pemilih tidak hanya mencoblos gambar partai akan tetapi mencoblos nama para calon presiden dan calon legislatif, sehingga para caleg harus :

- Memiliki kompetensi tertentu utamanya mengenai politik dan pemerintahan serta hal-hal yang terkait dengan kehidupan politik atau juga

... .. di bidang tertentu yang menyebabkan orang untuk

- Para caleg cenderung aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan hubungan sosial, sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemilu khususnya pemilu legislatif 2004.
- Harus adanya kesamaan dengan masyarakat pemilih yang menjadi sasaran pada pemilu legislatif 2004, kesamaan tersebut terutama pada sikap, nilai maupun kepercayaan. Adanya kesamaan akan sangat mendukung terjadinya interaksi yang lebih baik, sehingga terjadinya pengaruh lebih mudah.

D.5.Partai Golkar

D.5.1.Perkembangan Partai Politik

Partai sebagaimana dimengerti sebagai istilah politik sehari-hari untuk menunjukkan kekuatan politik dimasyarakat, tidaklah lahir dengan mudah. Sebagaimana institusi-institusi politik lainnya, Partai Politik menyita waktu dan pengorbanan yang begitu besar dari para pencipta dan pendukungnya sebelum ia di kenal dan diterima secara luas sebagai salah satu kelengkapan kehidupan politik manusia modern.

Pada awal berdirinya, hampir semua sistem partai baik di Eropa maupun Amerika memiliki ciri yang sama dan serupa, yakni lemah dan kurang mandiri. Kelemahan partai pada dasarnya merupakan fungsi dari sistem Partai Politik yang pada dasarnya juga lemah. Pada abad ke 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) sistem-sistem politik masih sering mengalami perubahan baik dari segi teritorial maupun kemampuan internal dari sistem politik itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini

kekacauan, korupsi, dan instabilitas mudah sekali merajalela. Huntington mengklarifikasi pertumbuhan dan perkembangan partai kedalam empat tahap, tahap faksional, tahap polarisasi, tahap perluasan, dan tahap pelembagaan³¹.

Kemudian pertumbuhan dan perkembangan partai, dijabarkan dalam tahap pertama, *Faksionalisasi*, masyarakat baru mengenal partai suatu invensi (penciptaan atau penemuan) kultural baru di tengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelembagaan politik. Pada tahap ini separuh dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional. Namun pada saat bersamaan belum menemukan penggantinya yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Politik ditandai dengan persaingan sengit antara kelompok atau fraksi yang berusaha memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Masyarakat kurang mengenal tuntutan organisasi politik modern yang melibatkan isu stabilitas dan penataan kehidupan politik. Kelompok-kelompok politik sering lebih merupakan sarana untuk menyalurkan dan memperkuat ambisi-ambisi segelintir orang atau bahkan keluarga. Masyarakat masih sangat asing dengan dua ciri organisasi politik modern, yakni organisasi profesional dan basis sosial pendukung organisasi sosial tersebut. Partai-partai politik modern menggabungkan dua dimensi pokok tersebut³².

Tahap kedua perkembangan sistem kepartaian adalah *polarisasi*. Dalam tahap ini partai tampak berusaha menerobos dinding-dinding sosial tradisional yang melindungi fraksi yang saling bersaing secara personal. Proses tinggal landas ini didukung oleh kondisi eksternal yang cukup memadai. Meningkatnya

³¹ Huntington, *Democracy in Developing Countries*, New York: Norton, 1968, hal. 4

kesadaran politik warga negara dengan sendirinya memperluas ruang lingkup partisipasi politik. Momen penting ini segera diikuti dengan meluasnya jenis dan macam kelompok-kelompok politik yang menghasilkan sebuah masyarakat majemuk dan kompleks. Heterogenitas masyarakat modern di tengah perubahan sosial ekonomi secara perlahan-lahan menumbuhkan polarisasi (pertentangan) kelompok sebagai akibat dari semakin kompleksnya masyarakat politik. Masyarakat yang terpolarisasi secara dinamis memperlebar basis sosial masing-masing kelompok sebagai akibat dari kebutuhan untuk memelihara dan memperkuat posisi masing-masing.

Pada tingkatan ini sistem partai memasuki tahap ekspansi atau perluasan, partai berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa. Dalam persaingan antara partai dukungan massa yang luas dan beragam serta berlapis-lapis merupakan syarat pokok untuk membangun kekuatan partai. Kekuatan-kekuatan sosial yang tumbuh dan berkembang membutuhkan sistem partai sebagai sarana menyalurkan dan mengendalikan eksistensi kepentingan kelompok. Dengan kata lain, pada tahap ketiga ini partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai agregator kepentingan umum.

Pada tingkat ini, *pelembagaan* adalah tahap akhir dari pertumbuhan Partai Politik, pada titik ini sistem partai relatif telah mencapai tahap mapan. Ditandai antara lain, dengan terbentuknya dua partai, sistem multi partai, atau sistem partai tunggal dominan. Sistem partai yang telah terlembaga relative tidak banyak

peralihan pemerintah oleh partai atau koalisi partai lain. Jangka waktu peralihan dari satu partai ke partai atau dari satu koalisi ke koalisi lain sangat bervariasi. Dari hanya beberapa tahun seperti di Amerika atau Jerman Barat, hingga puluhan tahun seperti di Jepang. Namun perubahan partai penguasa pada umumnya tidak mengganggu jalannya pemerintahan secara umum. Peralihan berlangsung sedemikian rupa sehingga usaha untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dijaga dengan ketat untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan politik. Dengan kata lain, antara pemerintah dengan oposisi telah mencapai apa yang disebut Robert A. Dahl sebagai hubungan keamanan timbal-balik (mutual security relationship). Pada keadaan ini baik oposisi maupun pemerintah telah menaruh hormat satu sama lain, jadi tidak ada lagi kecurigaan di antara keduanya³³.

Dalam sistem-sistem politik negara demokrasi liberal, Partai Politik pada umumnya telah mencapai tahap "pelembagaan". Pada sistem seperti ini fungsi Partai Politik lebih terpusat pada bagaimana melaksanakan dan memenangkan pemilihan. Partai menjadi sarana pokok untuk menduduki jabatan politik di pemerintah, suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya di banding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih³⁴.

Dalam pemilihan umum di negara demokrasi liberal, partai-partai lebih banyak mengutamakan ketenaran tokoh politiknya dari pada kebagusan ideologi partai. Popularitas tokoh politik menjadi ukuran keberhasilan karir seseorang

³³ Bambang Genta "Demokrasi Dan Testimoni Partai Politik" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996 Hal

dalam tubuh partai. Partai hanya tertarik pada tingkat popularitas pribadi tersebut untuk menarik dan mengumpulkan dukungan dari para pemberi suara. Untuk mendukung program partai dan memaksimalkan popularitas para tokohnya, partai sangat banyak memanfaatkan jasa media massa modern. Media massa sangat membantu partai dalam memperbaiki dan mengembangkan citra diri tokoh yang akan ditampilkan dalam kampanye pemilihan. Kombinasi antara ketenaran tokoh politik dan peranan media massa menjadikan tokoh-tokoh politik nasional lebih di kenal para pemilih dibandingkan tokoh politik lokal. Media massa, khususnya membuka peluang sebesar-besarnya kepada tokoh politik nasional untuk berdialog dengan semakin banyak calon pemilihan betapa pun jauhnya dari pusat-pusat kekuasaan politik.

Selanjutnya partai di negara-negara berkembang menunjukkan variasi dalam hal tugasnya sebagai organisasi politik, partai bisa berfungsi sebagai sarana mobilisasi massa, sebagai sarana pemeliharaan kepentingan status quo atau sebagai media politik berbagai komunitas yang tidak jarang satu sama lain saling bertentangan. Satu hal jelas bahwa partai di negara berkembang sangat vital sebagai sarana mobilisasi massa. Salah satu kelemahan partai di negara berkembang terletak pada kurang berhasil membina hubungan baik dengan massa pendukungnya, kecuali menjelang saat pemilihan umum akan berlangsung.

D.5.2. Pengertian Partai Politik

Pengertian Partai Politik diperlukan agar masyarakat pada umumnya dapat memahami apa yang dimaksud dengan Partai Politik, serta apa yang diperlukan

Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan (UU No.31 Thn.2002:pasal 1).

Yang dimaksud Partai Politik adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan dan setuju (terutama dibidang politik). Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka, maupun berdasarkan partai massa, yaitu Partai Politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya³⁵.

Partai Politik dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pimpinan partai, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil para anggotanya³⁶.

Lebih lanjut pengertian Partai Politik ialah setiap organisasi yang dibentuk warga negaranya secara suka rela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum ataupun tidak melalui pemilihan umum.

Partai Politik dalam pengertian modern dapat di definisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Batasan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mark N.Hagopion. Menurutnya,

³⁵ P.K.Poerwanta "Partai Politik Di Indonesia" Rineka Cipta, Jakarta, 1996 hal 6

Partai Politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan³⁷.

D.5.3. Fungsi Partai Politik

Fungsi Partai Politik yang utama mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu³⁸.

Fungsi Partai Politik yang terpenting adalah mengikuti pemilu untuk membentuk dan memberi legitimasi pada suatu pemerintahan. Namun dinegara-negara lain, partai didirikan tidak dengan maksud untuk mengikuti sebuah pemilihan umum. Partai dibentuk oleh sejumlah warga masyarakat hanya berdasarkan minat dan kepentingan sendiri.

Pengertian tentang fungsi-fungsi umum Partai Politik, antara lain³⁹:

1. Sosialisasi politik, sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.
2. Rekrutmen politik, yaitu seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
3. Partisipasi politik, kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.

³⁷ Ichiasul Amal, 1996: Xv

³⁸ Daman Sushelki "Memahami Ilmu Politik" Gramedia, Jakarta, 1992 Hal 116

4. Pemandu kepentingan, yaitu kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
5. Komunikasi politik, proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya.
6. Pengendalian konflik, yaitu sarana pengendalian konflik melalui dialog dengan pihak-pihak berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan untuk mendapatkan penyelesaian berupa kepentingan politik.
7. Kontrol politik, ialah kegiatan untuk menunjukkan, keasalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isu suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.

D.6.Kemenangan Partai Golkar

Sebagai partai politik, Partai Golkar telah membuktikan bahwa dalam proses kemandirian dirinya dimana TNI dan PNS tidak lagi dikaitkan dengan kepentingan politik Golkar, tetapi Partai Golkar tetap keluar sebagai salah satu pemenang pemilu 1999 setelah PDIP⁴⁰.

Dengan demikian perjuangan politik untuk mendapatkan dukungan rakyat sehingga mampu keluar menjadi pemenang pemilu 1999 dengan suara terbanyak kedua setelah PDIP salah satu kenyataan politik bahwa Partai Golkar masih

merupakan sebuah Partai Politik besar dalam kehidupan nasional. Dan kemenangannya tersebut. Merupakan bagian dari kemenangan rakyat Indonesia⁴¹.

Kemengan berasal dari kata menang, yang berarti dapat mengalahkan musuh, lawan, saingan. Sehingga lebih lanjut istilah menang dapat diartikan sebagai mendapat kemenangan atau perolehan karena dapat mengalahkan lawannya⁴².

Lebih lanjut, kemenangan Partai Golkar adalah kemenangan dalam perolehan suara yang lebih besar dibanding partai-partai politik lainnya melalui arena pemilihan umum, artinya, dengan kompetisi dalam pemilu, Partai Golkar dapat mengalahkan lawan-lawan politiknya untuk memperoleh dukungan suara yang lebih banyak, dengan menduduki posisi pertama sebagai partai pemenang pemilu dibananding partai-partai politik lainnya⁴³.

Pada pemilu legislatif 2004, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu yaitu menempati posisi pertama, dengan perolehan suara yang lebih besar dibanding partai-partai politik lainnya yang menjadi peserta pemilu legislatif 2004.

E. Definisi Konsepsional.

Yang di maksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk memberikan batasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Definisi Konsep yang akan digunakan adalah:

⁴¹ *Ibid* hal 56

⁴² *Ibid* hal 56

⁴³ *Ibid* hal 56

G. Metode Penelitian

G.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian Deskriptif, yaitu penyelidikan yang memberikan beberapa kemungkinan untuk masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan, menganalisis data, serta menginterpretasikan suatu analisa data yang diperoleh selama penelitian.

Menurut Syaifuddin Azwar, penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada tahap deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, sebab penelitian deskriptif boleh menggunakan hipotesis atau tidak menggunakannya⁴⁴

Dengan demikian penelitian deskriptif ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai peran elit lokal terhadap kemenangan Partai Golkar pada pemilu legislatif 2004 Di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah

G.2. Unit Analisis Data

Untuk mengumpulkan atau mendapatkan sampel yang memadai dari masalah yang diteliti, penelitian menggunakan pengambilan satu informan (*key person*) yang kemudian melebar keinforman berikutnya sehingga diharapkan

terkumpul sebanyak mungkin responden dalam menjawab pertanyaan tentang masalah yang diteliti. Dari metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi unit analisisnya yaitu pengurus yang ada di DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai dan masyarakat konstituen Partai Golkar.

G.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah menanyakan secara langsung dan mendalam dengan para pengurus dan anggota DPD II Partai Golkar di Kabupaten Banggai, caleg DPRD dari Partai Golkar hasil pemilu Legislatif 2004, anggota DPRD Partai Golkar pemilu 1999, serta masyarakat yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

b. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, majalah atau koran-koran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Partai Golkar dan pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.

G.4. Teknik Analisis Data

Menurut Quinn Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Pada

analisis data juga terdapat analisis yang menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian yang ada⁴⁵.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dimana data yang diperoleh diklarifikasi, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kesimpulan ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan melihat dasar analisis data yang dilakukan.

⁴⁵ Y. L. Mulyono, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001